



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 33/1995714

☐ Pembetulan Ke

☐ Pembatalan

**1721 - A2**

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP	:	<u>1219046104730002</u>	A.5 NAMA JABATAN	:	<u>Guru Golongan IV</u>
A.2 NIP/ NRP	:	<u>197304212001052002</u>	A.6 JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
A.3 NAMA	:	<u>Media Sihotang, S.Th</u>	A.7 NIK	:	<u>1219046104730002</u>
A.4 PANGKAT/ GOL	:	<u>IV/a / Pembina</u>	A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	<b>K/2</b>

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	64.034.200
2.	TUNJANGAN ISTRI	6.403.420
3.	TUNJANGAN ANAK	2.561.368
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	5.446.000
6.	TUNJANGAN BERAS	4.055.520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	1.116
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	8.527.800
9.	<b>JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 )</b>	<b>91.029.424</b>
<b>PENGURANG</b>		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	4.551.471
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.974.284
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	<b>JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)</b>	<b>7.525.755</b>
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 - 13 )	83.503.669
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	83.503.669
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	16.003.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	800.150
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	800.150
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	800.150
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	800.150
24.	<b>PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR</b>	<b>0</b>
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

**C. PEGAWAI TERSEBUT** C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

**D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	0001459718121000
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	<u>KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN</u>
D.3 ID Sub Unit Organisasi	:	<u>299013</u>
D.4 Tanggal	:	<u>3 1</u> dd <u>1 2</u> mm <u>2 0 2 5</u> yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN	:	<u>ZAINUL IHSAN NASUTION, SE</u>
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah